

	News Title : Bursa CPO Dipercayakan ke ICDX, Zulkifli Hasan Minta Perkuat Perdagangan Komoditi Unggulan Indonesia	
	Media Name : BeritaManado.com	Journalist : Sri Surya
	Publish Date : 15 October 2023	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 1,500,000
	Resources : Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan), Suhanto (Sekretaris Jenderal Kemendag), Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : Ekonomi Bisnis	Topic : Bursa CPO

Bursa CPO Dipercayakan ke ICDX, Zulkifli Hasan Minta Perkuat Perdagangan Komoditi Unggulan Indonesia

by **Sri Surya** — Minggu, 15 Oktober 2023, 09:49:41 di bawah the banner



Jakarta, **BeritaManado.com** — Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meluncurkan perdagangan pasar fuik minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm OilCPO) di Bursa Berjangka Indonesia pada Jumat (13/10/2023) di Jakarta.

Peluncuran Bursa CPO ini merupakan tindakan yang dilakukan Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam memperkuat tata kelola perdagangan CPO di Bursa Berjangka.

Selain itu, Bursa CPO Indonesia diharapkan dapat mendorong pertumbuhan harga acuan CPO.

Acara ini dihadiri kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Kopkasin Ageng RI, para anggota kepengurusan dan asosiasi sektor kelapa sawit, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan akademisi.

Mendag Zulkifli Hasan didampingi Sekretaris Jenderal Suhanto, Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko, Inspektur Jenderal Fida Adali, Direktur Jenderal Perdagangan Komoditi dan Tindak Naga Moga Simatungang, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Internasional, Wakil Wakil Bidang Manajemen dan Tata Kelola dan Agengriana, Hal Othman Hilang, Penjeagan Perdagangan Internasional Bera Hasbaban, serta jajaran Eselon II di lingkungan Bappebti.

Zulkifli Hasan mengatakan, peluncuran Bursa CPO Indonesia ini merupakan tindakan perbaikan tata kelola perdagangan CPO di Bursa Berjangka yang dilakukan dalam upaya memperkuat kinerja perdagangan CPO sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia.

"Selain itu, peluncuran Bursa CPO merupakan bentuk komitmen Kementerian Perdagangan mendorong terbentuknya harga acuan CPO yang transparan, akuratif, dan lebih wajar, baik untuk perusahaan besar, menengah, maupun pedagang kelapa sawit," tegas Mendag Zulkifli Hasan.

Zulkifli Hasan juga menjelaskan, Indonesia berkontribusi lebih dari 50 persen kebutuhan CPO dunia, namun belum memiliki harga acuan sendiri.

Harga patokan ekspor CPO saat ini bersumber dari Rotterdam dan Malaysia.

"Melalui transaksi CPO di Bursa Berjangka di Indonesia, diharapkan terbentuk harga CPO yang dapat dijadikan acuan pelaku pasar CPO ke depan," kata Zulkifli.

Lanjutnya, Indonesia belum memiliki harga acuan CPO, padahal Indonesia merupakan negara produsen CPO terbesar di dunia.

"Kami banyak mendapatkan keluhan dari pelaku usaha jika harga acuan masih bersumber dari negara lain tidak tepat, hal ini juga berdampak di lain, misalnya untuk pengalangan ekspor yang lebih tinggi. Untuk itu, Pemerintah memberilahi melalui Kementerian Bursa CPO Indonesia ini agar ke depan bisa menjadi market influence bagi dunia," ujar Mendag Zulkifli Hasan.

Zulkifli Hasan menekankan, CPO merupakan komoditas strategis Indonesia.

Pada 2022, produksi CPO Indonesia mencapai 40,73 juta ton dengan nilai ekspor mencapai USD 28,62 miliar.

Pada Mei 2023, produksi CPO Indonesia tercatat 20,86 juta ton atau lebih tinggi 15,74 juta ton dibanding Malaysia.

Selain itu, kata Mendag Zulkifli Hasan, perdagangan CPO di Bursa diharapkan menjadi sarana bagi industri atau pelaku kelapa sawit dalam menjaga harga sawit untuk melakukan transaksi komodinya dengan harga kompetitif.

"Peluncuran Bursa CPO Indonesia juga merupakan komitmen Kemendag dalam menciptakan ekosistem perdagangan CPO," lanjut Mendag Zulkifli Hasan.

Zulkifli Hasan menambahkan, pemerintah berkomitmen memperkuat tata kelola perdagangan CPO Indonesia melalui diterbitkannya Peraturan Bappebti (Perbup) No. 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan CPO di Bursa Berjangka.

Walaupun dikatakan ini bersifat sukarela (voluntary).

"Kedepan perdagangan CPO harus tetap berlandaskan dengan prinsip-prinsip yang diaman. Kalaupun ini juga harus disertai mendukung Indonesia menjadi bandar harga CPO dunia. Kita harus mengoptimalkan nilai ekonomi dari perdagangan CPO bagi kepentingan masyarakat Indonesia," imbuh Zulkifli.

Zulkifli Hasan berharap, Bursa CPO Indonesia dapat berkontribusi dengan pemerintah dan para anggota kepengurusan untuk meningkatkan Bursa Indonesia dalam mendukung transaksi CPO.

"Kuncinya adalah kolaborasi. Dengan kerja sama seluruh para anggota kepengurusan, siapa saja target Perbup ini akan terlaksana dengan baik, dan Bursa CPO Indonesia menjadi acuan harga di Indonesia. Terbentuknya Bursa CPO harus mendukung pengalangan perdagangan CPO dan mendukung Indonesia menjadi market influence di pasar global," kata Zulkifli Hasan.

Mendag Zulkifli Hasan juga menyebutkan, ke depan, Kemendag akan mengatur tata kelola ekspor CPO yang akan memfasilitasi pelaku usaha melalui Bursa Berjangka akan Dijen Perdagangan Luar Negeri.

Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menambahkan, pada 3 Oktober 2023, Bappebti akan menerbitkan peraturan Bursa CPO melalui Tata Cara Komoditi dan Derivatif Indonesia atau yang dikenal dengan Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-SP/PO/10/2023.

"Pemberitahuan Bursa CPO ini adalah hasil pemerintah hadir dalam upaya mendorong perdagangan CPO lokal yang wajar dan adil untuk memperkuat ketahanan dalam menghadapi tantangan bagi masyarakat. Kemendagri ini merupakan momen yang juga kami harap secara nasional pemerintah mendukung terbentuknya harga komoditas unggulan kita yaitu CPO harus lebih didorong agar menjadi tuan di rumah sendiri," ujar Didid.

Didid mengungkapkan, perdagangan CPO melalui Bursa Berjangka Indonesia ini bersifat sukarela, namun pihaknya yakin akan menjadi salah satu bentuk berkolaborasi dalam upaya memperkuat peranan CPO di Bursa Berjangka.

"Kami juga mendorong UMKD pengumpulnya pelaku kelapa sawit baik serta dalam Bursa CPO Indonesia ini. Hal ini karena perdagangan di Bursa akan memungkinkan penjual dan pembeli pada tingkat yang sama (same level playing field) serta memiliki hubungan baru yang sama karena perdagangan melalui Bursa akan memungkinkan penjual dengan pembeli," kata Didid.

Didid juga menjelaskan, untuk mengoptimalkan perdagangan CPO di Bursa Berjangka karena ini bersifat sukarela, perlu dilakukan berbagai sosialisasi dan pelatihan terkait mekanisme perdagangan di Bursa.

"Sesuai dari pelatihan ini akan dilakukan juga uji kepala peserta besar, namun juga peserta pelaku kelapa sawit," ungkap Didid.

Masud Didid, saat ini sudah terdapat 16 pelaku usaha CPO yang siap untuk berjangka melalui Bursa CPO Indonesia.

"Ya tentunya menjadi langkah awal yang baik. Bursa ini tidak mudah dan noi. Hal ini juga menunjukkan bahwa sudah ada keinginan kuat dari pelaku usaha untuk meningkatkan perdagangan CPO lebih adil dan transparan," jelasnya.

Didid juga menambahkan Bursa CPO sudah bisa live pada 21 Oktober 2023.

Alirnya perdagangan CPO melalui Bursa Berjangka sudah terjadi secara efektif.

Dengan demikian, mulai 21 Oktober 2023 nanti, sudah mulai terbentuk price discovery dan dengan upaya untuk meningkatkan kredibilitas Bursa.

Diharapkan pada triwulan pertama 2024 sudah mampu mewujudkan price reference.

"Pondasi Bursa CPO ini sebagai rencana transformasi Bappebti. Ke depan, Bappebti akan lebih fokus pada peningkatan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi sehingga yang berkembang langsung pada peningkatan kepercayaan masyarakat. Selain CPO ini, Bappebti akan memajukan dengan komoditi strategis kelapa sawit kopi, karet, kakao, dan sebagainya," ujar Didid.

Direktur Utama Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Nurdian mengatakan, penunjukan pemerintah kepada ICDX untuk menjadi penyelenggara Pasar Fuik CPO melalui Bursa ini tentunya adalah sebuah kepercayaan besar dari pemerintah.

ICDX sebagai lembaga yang memiliki pengalaman dalam menjalankan pasar CPO yang lebih, wajar, dan efisien.

Selain itu, ICDX juga berkomitmen menjadi Bursa yang inklusif dan menyediakan kosongan bagi semua pelaku pasar.

"Sudah menjadi kewajiban ICDX untuk mewujudkan Bursa CPO sebagai Bursa yang kredibel, mandiri, dan transparan. Secara teknis, kami telah siap untuk penyelenggaraan pasar fuik CPO ini termasuk dalam hal sistem perdagangan. Keadilan Bursa CPO Indonesia akan menjadi kemitraan negara sebagai produsen CPO terbesar di Bursa akan mewujudkan harga acuan CPO dunia. Ke depan, ICDX akan menjadi semua para anggota kepengurusan untuk bisa berkolaborasi dalam meningkatkan akurasi ini," ujar Nurdian.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan diskusi panel dengan narasumber Selebritis Bappebti Chy Andarika, Akademisi Botani Artis, dan Direktur ICDX Yugenady Tita Saputra.

Oky mengatakan, pembentukan Bursa CPO ini bukanlah akhir, namun awal dari langkah mewujudkan mimpi Indonesia yaitu memiliki harga acuan CPO sendiri.

Masih banyak proses yang akan dilakukan dan masih butuh banyak masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan perdagangan CPO melalui Bursa ke depan.

"Terlepasnya, keberadaan Bursa CPO ini tidak memberikan pelaku usaha sehingga akan banyak yang berpartisipasi ke dalam Bursa. Selain itu, kolaborasi antar kementerian dan lembaga juga harus dilakukan mengingat keterlibatan perdagangan CPO melalui Bursa diharapkan akan berbagai kegiatan dan kemitraan dan lembaga lain yang terkait," imbuh Oky.

Dari sisi akademis, peluncuran Bursa CPO adalah sinyal positif bagi perbaikan tata kelola perdagangan CPO Indonesia.

"Melalui memang pasar fuik CPO menjadi berjangka dengan berjangka. Namun masih pemerintah ini pada sisi akademis karena sudah berjalan dari sisi dari reformasi CPO, dengan terbentuknya Bursa diharapkan menjadi nilai CPO yang semakin tinggi. Hal yang tidak kalah penting, bagaimana Bursa harus membangun kredibilitas dan kepercayaan masyarakat," kata Nurdian.

Sementara itu Direktur ICDX Yugenady Tita Saputra menambahkan, komitmen ICDX dalam membangun amanah sebagai Bursa CPO Indonesia.

"Dengan semangat berkolaborasi kepada bangsa dan negara, ICDX selalu mengedepankan prinsip kredibilitas, transparansi, dan lebih dalam meningkatkan ICDX bersama dengan dukungan pemerintah dan masyarakat. Bursa CPO dapat memberikan dampak yang signifikan dalam perbaikan tata kelola perdagangan CPO Indonesia dan menjadi pijakan dalam pembentukan harga acuan yang lebih adil dan bersaing," kata Yugi.